

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2022)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

MILLENIA JENNIFER PATRICIA MALINGGAS

12180350

DUTA WACANA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2025

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2022)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

MILLENIA JENNIFER PATRICIA MALINGGAS

12180350

DUTA WACANA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Millenia Jennifer Patricia Malinggas
NIM/NIP/NIDN : 12180350
Program Studi : Akuntansi
Judul Karya Ilmiah : Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi kasus di provinsi Sulawesi utara tahun 2016-2022)

dengan ini menyatakan:

- bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/reviewer.
- bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.
- bahwa karya saya dengan judul di atas sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.
- bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.
- bahwa Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.
- menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.
- h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.
- i. mengajukan agar karya saya ini: *(pilih salah satu)*

- ☒ Dapat diakses tanpa embargo.
- ☐ Dapat diakses setelah 2 tahun.*
- ☐ Embargo permanen.*

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.

*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo *(bisa lebih dari satu)*:

- ☐ dalam proses pengajuan paten.
- ☐ akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.**
- ☐ akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.**
- ☐ telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... ***
- ☐ telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. ... ***
- ☐ berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan keamanan nasional.
- ☐ berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
- ☐ terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
- ☐ Lainnya (mohon dijelaskan)

**Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.

***Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

Yogyakarta,

Mengetahui,

Yang menyatakan,

Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si
NIDN/NIDK 0029116201



Millenia Jennifer Patricia Malinggias
NIM 12180350

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2022)”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

MILLENNIA JENNIFER PATRICIA MALINGGAS

12180350

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 18 Juni 2025

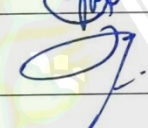
Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Dielanova Wynni Yuanita, SE., M.Sc., BKP.
(Ketua Tim Penguji)
2. Servatia Mayang Setyowati, S.Pd., M.Sc
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih., M.Si
(Dosen Pembimbing)







Yogyakarta, _____

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Rossalina Christanti, SE., M.Acc.

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

“PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2022)”

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari pihak lain dari Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika kemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia diberikan sanksi yakni pencabutan gelar saya

Yogyakarta, 09 Juni 2025



RC6AAAMX425721605

Millenia Jennifer Patricia Malinggas

(12180350)

DOTA WACANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia- Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2022)”. Penulisan skripsi ini diselesaikan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini memberikan arahan dan saran bagi penulisan skripsi penulis.

Penulis menyadari ada kekurangan pada penelitian skripsi ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik senantiasa diharapkan demi perbaikan penulis. Penulis juga berharap semoga skripsi ini mampu memberikan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 09 Juni 2025

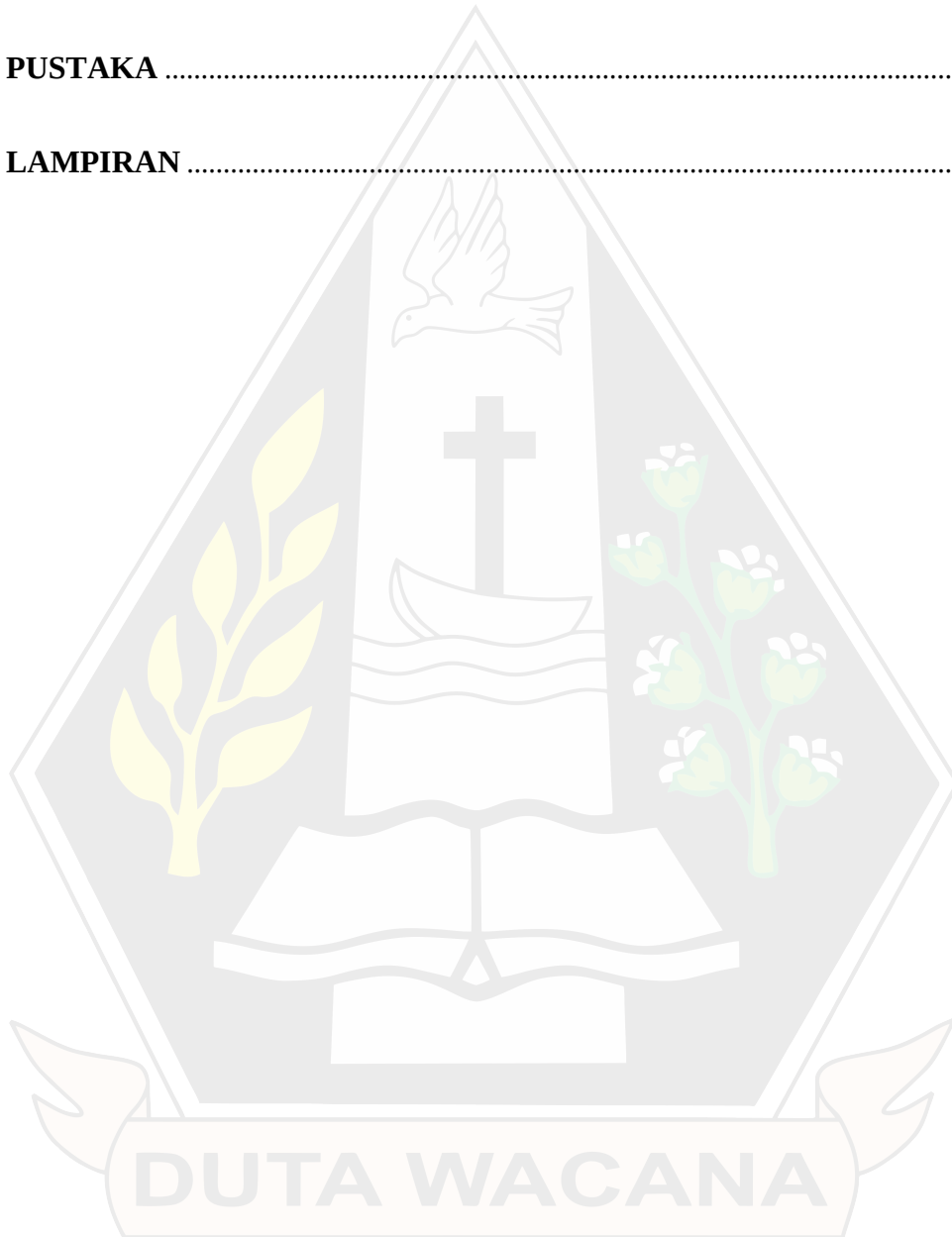
DUTA WACANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATAPENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kontribusi Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah	9
2.3 Otonomi Daerah.....	10
2.4 Analisis Rasio Keuangan.....	10
2.5 Penelitian Terdahulu	13
2.9 Hubungan antara Derajat Desentralisasi dengan Pertumbuhan Ekonomi	14
2.10 Hubungan antara Ketergantungan dengan Pertumbuhan Ekonomi	15
2.11 Hubungan antara Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data	17
3.1.1 Jenis Data.....	17
3.1.2 Metode Pengumpulan Data	17
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	17
3.3 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara	19
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1 Analisis Hasil	20
4.2 Pembahasan	26

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	30
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	32
DAFTAR LAMPIRAN	36



**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2022)**

Millenia Jennifer Patricia Malinggas

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

millenia.m@students.ukdw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan studi kasus pada Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2016–2022. Kinerja keuangan daerah diukur melalui tiga indikator utama, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, dan rasio belanja modal. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model menggunakan software EViews. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio ketergantungan keuangan memiliki pengaruh positif namun juga tidak signifikan, sedangkan rasio belanja modal menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perencanaan belanja modal yang lebih produktif dan terarah.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Belanja Modal

**THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE ON REGIONAL ECONOMIC
GROWTH (Case Study in North Sulawesi Province 2016-2022)**

Millenia Jennifer Patricia Malinggas

Department Accounting Faculty of Business

Duta Wacana Christian University

millenia.m@students.ukdw.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of financial performance on regional economic growth, using a case study of North Sulawesi Province during the period 2016–2022. Regional financial performance is measured through three key indicators: the degree of decentralization ratio, fiscal dependency ratio, and capital expenditure ratio. The research method employed is panel data regression analysis using the Random Effect Model, with data processed through EViews software. The data utilized are secondary data obtained from the Regional Government Financial Reports (LKPD) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) across 15 regencies/cities in North Sulawesi Province.

The results show that the degree of decentralization ratio has a negative and insignificant effect on regional economic growth. The fiscal dependency ratio has a positive but also insignificant effect, while the capital expenditure ratio demonstrates a negative and insignificant relationship with economic growth. These findings indicate that regional financial performance has not yet significantly contributed to economic growth. Therefore, improvements are needed in budget management efficiency, enhancement of locally-generated revenue (PAD), and the implementation of more productive and targeted capital expenditure planning.

Keywords : *Regional Financial Performance, Economic Growth, Degree of Decentralization Ratio, Fiscal Dependency Ratio, Capital Expenditure Ratio*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Pemerintahan Orde Lama, Indonesia menerapkan sistem sentralisasi yang merujuk pada kecenderungan pemerintah pusat memegang kekuasaan dan wewenang di tingkat nasional, yang berarti bahwa pemerintah pusat memiliki kontrol lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan yang mendasari sentralisasi pada masa itu adalah untuk menyatukan dan mengeratkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat masih terdapat beberapa daerah yang hendak memerdekakan diri pada awal Indonesia merdeka. Pada masa Orde Baru Indonesia juga masih menggunakan sistem sentralisasi namun dengan tujuan berbeda yaitu menjaga kestabilan ekonomi sosial dan politik. Namun pada perjalanan implementasi penerapan sentralisasi, Indonesia mengalami krisis yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Puncaknya pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter akibat minimnya pendapatan pemerintah di bidang sektor pajak dan retribusi, sehingga berdampak pada pemerintah yang tidak mampu mendanai proyek pembangunan. Krisis yang terjadi menimbulkan beberapa pengaruh seperti ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan tidak efisiennya kondisi ekonomi, oleh karena itu menghambat para pelaku ekonomi dalam mencapai kesejahteraan sosial yang optimal, dan berbagai bentuk kesenjangan sosial timbul akibat lambatnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis moneter. Berbagai dampak yang terjadi memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong masyarakat menuntut perubahan di segala bidang. Sehingga pada tahun 1998 pemerintah pusat akhirnya mendelegasikan sebagian wewenang kepada daerah yang

disebut otonomi daerah. Pemerintah melimpahkan kewenangan tersebut, agar setiap daerah mampu menyediakan dana secara mandiri dan mengelolanya untuk pembangunan dan kegiatan ekonomi daerah masing-masing.

Berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterangkan secara ringkas bahwasanya otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, serta tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola maupun mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing. Menurut Sujarweni (2015), otonomi daerah juga mencakup kebebasan bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri menetapkan peraturan, menyusun serta menjalankan kebijakan, dan mengelola keuangan daerah. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa daerah otonom merupakan wilayah administratif yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi lokal, akan tetapi masih tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, salah satunya adalah kontribusi PAD yang rendah, yang menyebabkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dana pemerintah pusat (Sofi, 2021). Kondisi tersebut diperkuat oleh data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai APBD tahun 2017, yang mencatat bahwa sebesar 66,1% atau senilai Rp664,5 triliun dari total pendapatan daerah nasional sebesar Rp1.005,2 triliun masih berasal dari dana perimbangan. Sementara itu, rata-rata rasio kemandirian fiskal daerah secara nasional pada tahun yang sama hanya mencapai 24,2%. Daerah-daerah di

Pulau Jawa menjadi satu-satunya wilayah yang mencatat rasio kemandirian di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 34,8%, sedangkan daerah lainnya berada di bawah angka tersebut, bahkan Provinsi Papua mencatat rasio terendah yaitu 6,0%.

Dalam kaitan ini, pemerintah daerah harus memiliki kewenangan dalam operasional agar terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan mengevaluasi capaian pemerintah secara berkala (Halachmi, 2017). Saputra, Suwendra, & Yudiaatmaja (2016) sebagai pengelola ekonomi, pembangunan, dan layanan publik, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan pemerintahan dengan transparan serta mampu bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan guna mencapai pemerintahan yang bersih. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus secara efisien, tertib, efektif, transparan, ekonomis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip pengelolaan ini harus mengacu pada asas keadilan, kepatutan, kemanfaatan bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap aturan undang-undang. Manajemen keuangan daerah yang baik diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang berlangsung dengan berkelanjutan dalam suatu periode. Pertumbuhan ini dalam konteks perspektif ekonomi makro merupakan salah satu sasaran utama karena berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kuncoro (2004) mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni ketersediaan barang dan modal, jumlah penduduk, tingkat kemajuan teknologi, dan luas wilayah dan kekayaan sumber daya alam. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

memaparkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, dimana pada tahun 2018 yaitu 6% menjadi 5,65% di tahun 2019, serta mencapai titik terendah - 0,99% pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19. Meski demikian, pada tahun 2021 hal tersebut mulai membaik dengan pertumbuhan 4,16% dan meningkat menjadi 5,42% di tahun 2022. Peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi di daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang ekonomi menjadi faktor penting yang membutuhkan dukungan pembiayaan melalui belanja modal.

Mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap maupun aset yang lain yang memberikan manfaat di atas satu periode akuntansi. Belanja modal seperti yang diterangkan oleh Jaeni dan Anggana (2016) mencakup pembelian serta pembangunan aset tetap, seperti tanah, peralatan, bangunan, dan aset tak berwujud guna mendukung pelayanan publik. Semakin besar infrastruktur yang dibangun, maka alokasi belanja modal yang dikeluarkan juga akan bertambah besar, dan ini harapannya bisa memacu pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kinerja keuangan daerah. Namun demikian, tidak semua bentuk belanja modal secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pengeluaran untuk pengadaan kendaraan dinas belum tentu berdampak pada peningkatan produktivitas wilayah. Oleh karena itu, perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilakukan secara cermat serta tepat sasaran. Budiarmo et al. (2015) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangannya tercermin

melalui APBD, dimana ini mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan pembangunan, serta penyediaan layanan publik. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diterangkan bahwa APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan yang telah disetujui DPRD dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. APBD berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sebagaimana prinsip otonomi daerah, sehingga evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah menjadi aspek yang sangat penting.

Menurut Sijabat (2014), kinerja keuangan mencerminkan tingkat pencapaian keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi target keuangan yang telah ditetapkan, yang dinilai melalui indikator-indikator keuangan. Evaluasi kinerja ini dilakukan berdasarkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, Fauzi A. (2020) menjelaskan bahwa analisis terhadap kinerja keuangan mencakup beberapa tahapan, yaitu menelaah laporan keuangan, melakukan penghitungan rasio, membandingkan hasil penghitungan, menafsirkan data, serta merumuskan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, analisis ini dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan, yakni suatu ukuran yang diperoleh dari perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan (Awani & Hariani, 2021). Adhiantoko (2013) mengklasifikasikan rasio keuangan daerah ke dalam beberapa jenis, antara lain rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi, efektivitas PAD, rasio derajat desentralisasi, dan rasio keserasian. Indikator kinerja keuangan pada penelitian ini mencakup rasio belanja modal, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pendukung.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang sudah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi diberi tanggung jawab serta kewenangan dalam merancang APBD agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Provinsi ini dianggap relevan sebagai lokasi penelitian karena menunjukkan konsistensi dalam usaha meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah, yang tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2010 hingga 2015, serta adanya kecenderungan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi dari sektor perikanan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata, ditambah dengan penerimaan dari pajak serta retribusi daerah, diharapkan mampu memperkuat kondisi fiskal daerah dan secara bertahap menurunkan ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Hal ini penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan mendukung keberhasilan implementasi otonomi daerah secara menyeluruh.

Mengacu pada pemaparan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2022). Pemilihan wilayah ini didasarkan pada potensi ekonominya yang signifikan, khususnya di sektor perikanan, pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Apabila potensi tersebut dikelola secara optimal, diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi daerah. Harapannya melalui penelitian ini bisa didapatkan pemahaman komprehensif terkait kondisi kinerja keuangan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dapat diidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada penjelasan sebelumnya, penulis meneliti apakah pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018-2022 dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu (1) biaya modal (2) derajat desentralisasi (3) ketergantungan keuangan (4) pertumbuhan ekonomi.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan rasio keuangan.

1.4 Kontribusi Penelitian

1) Peneliti

Penelitian ini berperan sebagai sarana pembelajaran dalam rangka menyelesaikan studi sarjana, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengukuran pengaruh kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara melalui analisis rasio keuangan.

2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

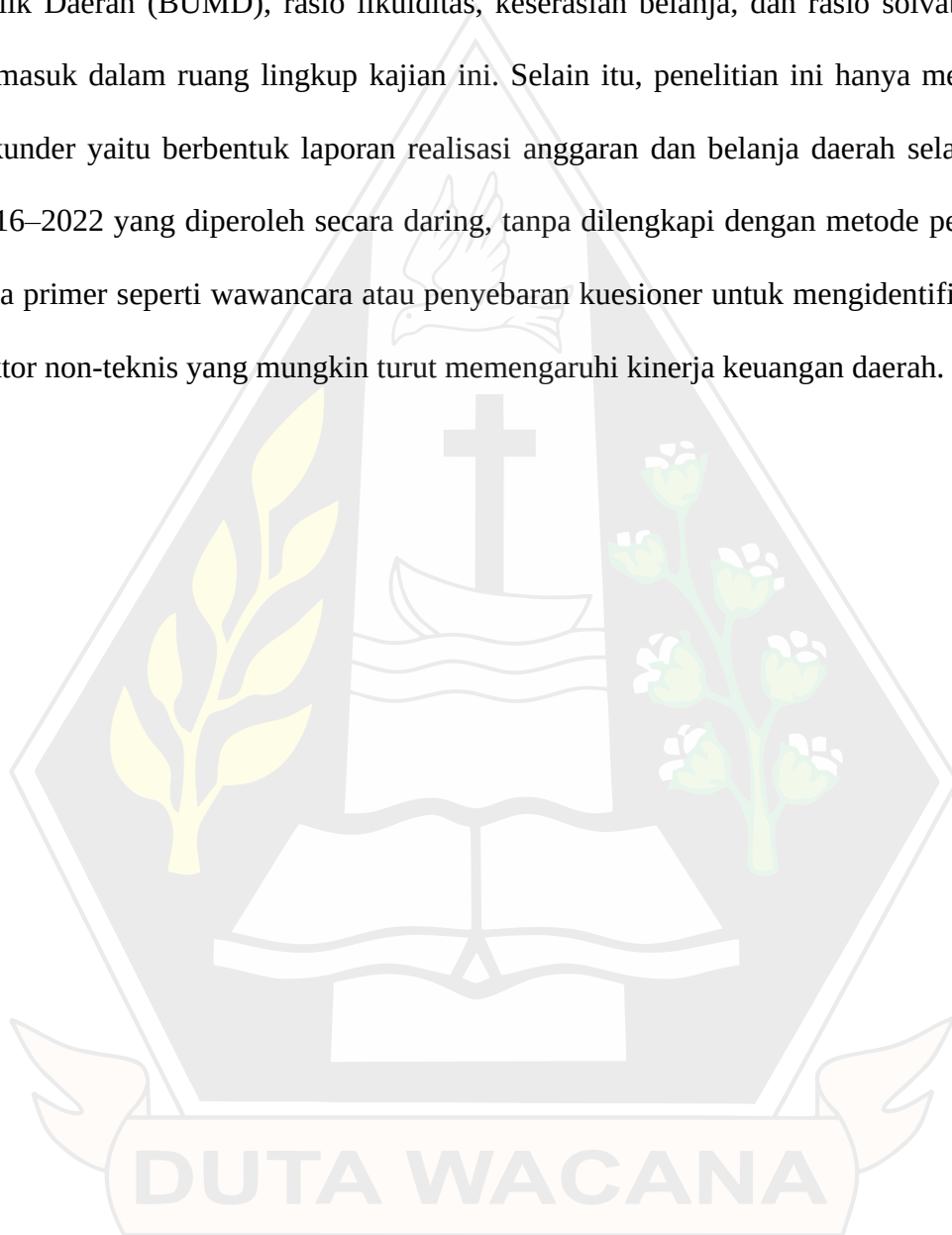
Bisa untuk menjadi bahan referensi dalam proses evaluasi dan pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga mampu mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi regional.

3) Akademis dan Peneliti Selanjutnya

Bisa memberi kontribusi sebagai informasi tambahan serta dasar kajian bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan analisis pada empat indikator utama kinerja keuangan daerah, yakni rasio ketergantungan keuangan, rasio derajat desentralisasi, biaya modal, serta tingkat pertumbuhan ekonomi. Adapun indikator lain seperti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), rasio likuiditas, keserasian belanja, dan rasio solvabilitas tidak termasuk dalam ruang lingkup kajian ini. Selain itu, penelitian ini hanya memakai data sekunder yaitu berbentuk laporan realisasi anggaran dan belanja daerah selama periode 2016–2022 yang diperoleh secara daring, tanpa dilengkapi dengan metode pengumpulan data primer seperti wawancara atau penyebaran kuesioner untuk mengidentifikasi faktor-faktor non-teknis yang mungkin turut memengaruhi kinerja keuangan daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

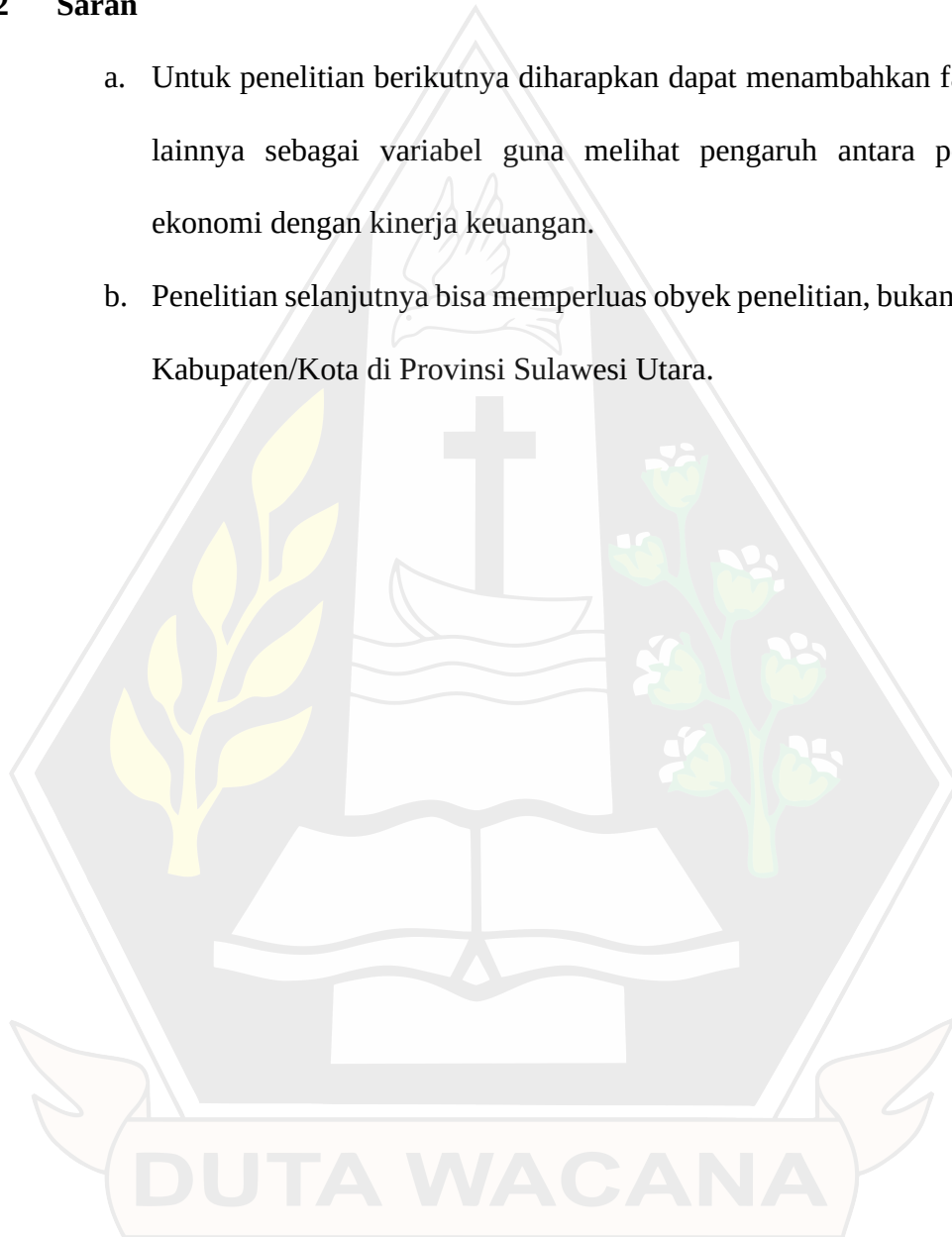
Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap tiga variabel kinerja keuangan daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Nilai signifikansi yang melebihi 0,1 dan arah hubungan negatif menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pemanfaatan potensi lokal dan pengelolaan sumber pendapatan daerah.
- b) Rasio ketergantungan keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf signifikansi 10%. Meskipun menunjukkan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, temuan ini menandakan bahwa transfer dana masih memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah, khususnya ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal. Namun demikian, ketergantungan jangka panjang dapat menjadi hambatan fiskal, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
- c) Belanja modal menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini mengisyaratkan bahwa alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum dikelola secara efektif dan

produktif. Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pengeluaran belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

5.2 Saran

- a. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan faktor-faktor lainnya sebagai variabel guna melihat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan.
- b. Penelitian selanjutnya bisa memperluas obyek penelitian, bukan hanya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.



DAFTAR PUSTAKA

Adhiantoko, A. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Menggunakan Rasio Keuangan*.

Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Apriana, Y., & Suryanto, T. (2010). *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 7(1), 41–55.

Apriesa, A. D., & Miyasto. (2013). *Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007–2011* (Skripsi). Universitas Diponegoro.

Awani, N., & Hariani, D. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Rasio dan Evaluasinya*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.

Azis, M. I., & Dhamar, M. C. (2020). *Pengaruh ketergantungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah, 15(2), 125–138

Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Basuki, A. T. (2015). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis: Dilengkapi aplikasi SPSS & EVIEWS*. Mitra Wacana Media

Budiarso, A., Soemarno, R. P., & Yani, A. (2015). *Manajemen Keuangan Daerah: Strategi Meningkatkan Kinerja APBD*. Jakarta: Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). *Laporan Realisasi APBD Nasional Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Fauzi, A. (2020). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Ginting, L. R., & Rasbin. (2010). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.

Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis* (7th ed.). Prentice Hall.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Halachmi, A. (2017). Performance measurement: Test the water before you dive in. *International Journal of Public Administration*, 40(9), 749–757.
- Handarini, S. (2014). *Analisis regresi data panel dengan pendekatan fixed effect dan random effect* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta)
- Immanuel, R. A. P., et al. (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 3(2), 55–67.
- Jaeni, K., & Anggana, R. A. (2016). *Manajemen Belanja Modal Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Linawati, & Solikah, M. (2019). *Kinerja Keuangan Daerah yang Dimoderasi oleh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 45–60.
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal decentralization and economic growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49(1), 1–21.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Oldri, O. P., et al. (2019). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan di Sulawesi Utara*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 101–110.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saputra, M. A., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 69–75.

Sedyadi, E. A. (2014). *Analisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan data panel* (Tesis, Universitas Diponegoro)

Setiawan, R., & Fauzan, R. (2019). *Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi: Sebuah kajian empiris di tingkat provinsi*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–58.

Sijabat, R. P. (2014). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Medan: USU Press.

Sirajudin. (2017). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 5(1), 32–45.

Sofi, M. (2021). *Otonomi Daerah dan Tantangannya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Yogyakarta: Deepublish.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 2(1), 87–99.

Suwandi, & Tahar, M. (2015). *Analisis kinerja keuangan daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Waryanto, R. (2017). *Belanja Modal dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(2), 54–62.

Wicaksono, A., & Rahman, A. (2020). *Otonomi Daerah: Konsep dan Implikasinya*. Jakarta: Graha Ilmu.

Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

